

## 800 Milenial Jadi Petani di Padang

**PADANG (IM)**- Jumlah petani milenial di Kota Padang, Sumatera Barat, tercatat sekitar 800 orang. Mereka tergabung dalam 600 kelompok tani. “Petani milenial itu berumur 19 tahun sampai 39 tahun. Data tersebut diambil dari Sistem Informasi Penyalur Pertanian (Simluhtan). Seluruhnya terdata by name by address,” ujar Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Yoice Yuliani kepada, Kamis (1/2).

Yoice menjelaskan, saat ini belum ada kelompok khusus petani milenial. Mereka masih bercampur dengan petani lainnya dalam kelompok tani.

“Petani milenial yang tergabung dalam kelompok tani tadi, usahanya masih sama dengan petani lainnya. Belum ada yang spesifik,” katanya.

Lebih jauh dikatakannya, Pemkot Padang sangat mendukung petani milenial. Apabila petani milenial tersebut membentuk kelompok tani, mereka bisa mendapat-

kan bantuan dari Pemkot Padang. “Apabila ada petani yang membentuk kelompok tani milenial, kami dari Pemkot Padang akan memberikan dukungan. Untuk bisa mendapatkan bantuan tentunya mereka harus memenuhi aturan dan syarat yang berlaku,” ungkap Yoice.

Menurut Yoice, pihak Kementerian Pertanian sudah meluncurkan program youth entrepreneurship and employment support service (Yess) untuk menarik para milenial menjadi petani. “Untuk mengikuti program tersebut, bisa mendaftarkannya melalui link yang ada di Kementerian Pertanian. Sedangkan kita juga sudah mensosialisasikannya melalui penyuluh,” sebutnya.

Dikatakan Yoice, petani milenial ini diharapkan mampu untuk memanfaatkan teknologi untuk pengembangan pertanian. ● **pra**

# 8 | Nusantara



### AKSI BERSIH SITU DI KABUPATEN BOGOR

Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tosepu (kiri) bersama Ketua DPRD Kab. Bogor Rudy Susmanto (kanan) melepas bibit ikan disela aksi bersih sampah di Situ Cibinong, Kab. Bogor, Jabar, Kamis (1/2). Aksi yang melibatkan relawan dari unsur pemerintah dan masyarakat tersebut sebagai upaya mewujudkan optimalisasi pemanfaatan situ untuk penyeimbang ekosistem serta sebagai upaya pengendalian banjir Jabodetabek.

IDN/ANTARA

## Asmawa Tosepu Bertekad Benahi Kabupaten Bogor

**CIBINONG (IM)**- Pemkab Bogor untuk ketiga kalinya secara berturut-turut mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK-RI Perwakilan Jawa Barat. Dalam predikat WDP dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut, sejumlah penyedia jasa bakal diminta mengembalikan uang sebagai dugaan prakiraan kerugian negara, nilainya mencapai Rp 6 miliar.

Penjabat Bupati Bogor, Asmawa Tosepu pun meminta Inspektoral dan Badan Pengelolaan Keuangan Asat Daerah (BPKAD) untuk menagih prakiraan kerugian negara. “Saya menugaskan Inspektoral dan BPKAD menagih prakiraan kerugian negara yang umumnya dari para penyedia jasa, Pemkab Bogor diberikan waktu 60 hari oleh BPK-RI Perwakilan Jawa Barat dan kalau penyedia jasa tidak mau mengembalikan uangnya maka akan kami limpahkan ke aparat penegak hukum,” ucap Asmawa Tosepu kepada wartawan, Kamis (1/2).

Asmawa Tosepu menuturkan dalam masa kepemimpinannya di Bumi Tegar

Beriman, ia menargetkan bahwa kedepan Pemkab Bogor bakal mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Saya menargetkan kedepan Pemkab Bogor mendapatkan predikat WTP, caranya dengan melaksanakan secara tuntas tanggakan rekomendasi BPK-RI Perwakilan Jawa Barat selama beberapa tahun terakhir,” tutur pria berusia 49 tahun tersebut.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mendukung Penjabat Bupati Bogor, Asmawa Tosepu yang bakal melaksanakan secara tuntas tanggakan rekomendasi BPK-RI Perwakilan Jawa Barat seperti persoalan hukum yang menjerat PT. Prayoga Pertambangan Energi dan proyek pembangunan RSUD Parung atau Klinik Pratama Rawat Jalan Parung.

“Saya mendukung Penjabat Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, untuk membenahi tata kelola pemerintahan daerah, agar Bupati Bogor terpilih nanti langkahnya lebih ringan karena saat itu Pemkab Bogor dapat predikat WTP dari BPK-RI Perwakilan Jawa Barat,” kata Rudy Susmanto. ● **gio**

IDN/ANTARA



### PAMERAN FOTO PERS MENGAWAL PESTA DEMOKRASI

Pengunjung mengamati karya foto pada pameran bertajuk Pers Mengawal Pesta Demokrasi Indonesia dari Masa ke Masa di Monumen Pers Nasional, Solo, Jateng, Kamis (1/2). Pameran yang digelar dalam rangkaian Festival Pers Nasional 2024 tersebut menampilkan 60 foto jurnalistik dan pemberitaan cetak Pemilu pertama 1955 hingga Pemilu 2009 guna menghadirkan informasi perkembangan demokrasi Indonesia.

## Warga Yogya Diminta Waspada Bakteri dari Kencing Tikus

**YOGYAKARTA (IM)**- Warga Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), diminta waspada akan penyebaran penyakit leptospirosis pada musim hujan ini. Pasalnya, bakteri Leptospira yang dapat ditularkan dari kencing tikus ini dapat mudah tersebar lewat aliran air maupun genangan saat hujan.

Menurut Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta, Lana Unwanah, pada 2023 terdapat 23 kasus leptospirosis. “Kasusnya tersebar merata di wilayah Kota Yogyakarta, tidak ada yang meninggal,” kata dia.

Meski demikian, saat musim hujan ini, Dinkes Kota Yogyakarta kembali mengingatkan masyarakat agar waspada akan penyakit leptospirosis. Lana menjelaskan, leptospirosis dapat menular secara langsung melalui darah, urine, atau cairan tubuh lain

yang mengandung bakteri Leptospira dan masuk ke dalam tubuh. Selain itu, penularan langsung ke manusia dari hewan yang terinfeksi bakteri Leptospira.

Sedangkan penularan secara tidak langsung dapat melalui genangan air, sungai, danau, selokan, saluran air, dan lumpur yang tercemar urine dari hewan terinfeksi Leptospira. “Bisa ditularkan melalui kencing tikus yang terinfeksi bakteri Leptospira. Bakteri masuk melalui kulit yang lecet atau selaput lendir pada saat kontak dengan genangan air sungai, selokan, lumpur yang tercemar kencing tikus,” kata Lana.

Lana menjelaskan, masa inkubasi leptospirosis rata-rata tujuh hari hingga sepuluh hari. Ada sejumlah gejala penyakit tersebut, yakni berupa demam, nyeri kepala, dan nyeri otot, khususnya di daerah betis, paha, mata kuning, serta tidak kencing sampai enam jam setelah dua hari-lima hari sebelumnya. ● **pra**

# Ini Daftar 22 Petahana yang Lolos Kembali ke DPRD Kabupaten Bogor

Didominasinya wajah baru pada kursi DPRD Kabupaten Bogor 2024-2029, karena adanya ketidakpuasan masyarakat akan kinerja wakil rakyatnya.

“Banyak rakyat yang tidak puas akan kinerja wakil rakyatnya,” kata Pendiri LS Vinus, Yusfitriadi.

**CIBINONG (IM)**- Hanya 22 calon petahana yang akan bertahan di DPRD Kabupaten Bogor 2024-2029. Siapa saja mereka?

DPRD Kabupaten Bogor 2024-2029 diperkirakan akan lebih didominasi wajah baru. Kurangnya kepercayaan rakyat atas kinerja mereka pada periode berjalan, menjadi salah satu alasan.

Dari hasil survei yang di-

lakukan Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus), di beberapa daerah pemilihan, bahkan ada yang hanya satu kandidat petahana yang akan terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Bogor 2024-2029.

Lalu, siapa saja anggota DPRD Kabupaten Bogor periode berjalan yang akan tetap bertahan pada periode berikutnya?

Pendiri LS Vinus, me-

nurkan di daerah pemilihan (Dapil) I, Rudy Susmanto, Agus Salim, Robinson Sitorus, dan Arif Abdi adalah petahana yang diprediksi akan terpilih kembali.

Di Dapil II, Ansori Setiawan, Beben Suhendar, Muad Khalim dan Amin Sugandi selaku incumbent dan Junaidi Syamsudin yang pernah duduk sebagai DPRD Kabupaten Bogor pada Pileg 2014 lalu, akan terpilih kembali.

“Sementara di Dapil III, hanya Wawan Hikal Kurdi dan Heri Rustandi selaku incumbent yang akan duduk kembali sebagai DPRD Kabupaten Bogor,” tutur Yusfitriadi.

Di Dapil IV, jelas pengamat politik dan kebijakan publik tersebut, Lukmanudin Ar-Rasyid dan Usep

Syaefullah selaku petahana juga akan terpilih kembali dan duduk sebagai DPRD Kabupaten Bogor.

Lalu, untuk Dapil V, lima orang incumbent terpilih kembali sebagai legislator DPRD Kabupaten Bogor, yaitu Aan Triana Al-Muhammad, Halim Yohanes, Sastra Winara, Jaro Peloy dan Yuyud Wahyudin.

Sementara di Dapil VI, dari delapan Caleg yang bakal terpilih, hanya tiga orang yang merupakan incumbent yaitu Irvan Baihaqi Tabrani, Andi Permana, dan Sutisna.

Yusfitriadi melanjutkan bahwa didominasinya wajah baru pada kursi DPRD Kabupaten Bogor 2024-2029, karena adanya ketidakpuasan masyarakat akan kinerja wakil rakyatnya.

“Banyak rakyat yang tidak puas akan kinerja wakil rakyatnya. Alasan lainnya, masyarakat ingin mencoba dan memilih calon legislatif (caleg) baru untuk duduk sebagai legislator DPRD Kabupaten Bogor,” lanjut Yusfitriadi dari LS Vinus.

Survei elektoral politik oleh LS Vinus dilakukan pada 22-28 Januari lalu, dengan metode sample random teori slovin dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 5 persen.

Dari 2.400 responden, hanya 7 persen yang belum menentukan pilihan. Dari suara itu, dengan metode Sainte Lague dikonversi ke jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), lalu jumlah kursi DPRD Kabupaten Bogor. ● **gio**

## Penanganan Blankspot di Kab. Bogor tak Kunjung Rampung di Tahun 2024

**BOGOR (IM)**- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyebutkan bahwa permasalahan blankspot di Kabupaten Bogor tidak akan selesai di tahun 2024.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Bayu Ramawanto. Ia menegaskan bahwa permasalahan nihil jaringan seluler di sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor tidak akan selesai di tahun 2024 ini.

“Masih tetap ada (blankspot), target Kabupaten Bogor (nihil blankspot) secepatnya,” kata Bayu, Kamis (1/2).

Menurut Bayu, penye-

bab banyaknya blankspot di wilayah administrasinya disebabkan oleh kontur wilayah perbukitan hingga pegunungan.

“Kita kan melihat kontur wilayah kita yang banyak perbukitan dan pegunungan, itu jujur menyulitkan capaian jaringan berkaitan dengan internet,” terangnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bayu dan pihak Pemkab Bogor telah berkoordinasi dengan PT Telkom guna mencari solusi untuk menangani masalah blankspot tersebut.

“Tidak hanya sekadar blankspot sebenarnya, itu lebih kepada lemah sinyal. Karena kalo blankspot

itu bisa jadi diminta atau dibuat supaya tidak terjadi sinyal di situ, karena mungkin instalasi vital,” ucap Bayu.

Langkah penanganan blankspot ini dibuktikan oleh Pemkab Bogor dengan pemasangan akses instalasi internet di Kampung Ciguha, Desa Bantar Karet, Kecamatan Klapanunggal.

“Di situ ada masyarakat sekitar 200 KK itu sedang berproses, tapi karena ini memerlukan perangkat yang demikian besar, jadi kita harus juga meninjau kelayakan perangkat (yang dipasang di sana), pungkasnya. ● **gio**

## 20 Kantor Pemerintahan Kota Bogor Bakal Dipindah ke Katulampa

**BOGOR (IM)**- Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, melakukan kajian mengenai rencana pemindahan 20 kantor pemerintahan ke lahan calon pusat pemerintahan di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bogor, Rudy Mashudi di Bogor, Kamis (1/2), menjelaskan saat ini rencana pembangunan pusat pemerintahan Kota Bogor memasuki tahap penyusunan Detail Engineering Design (DED).

Pusat pemerintahan baru Kota Bogor akan dibangun di lahan hibah aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) seluas 6 hektare. Proyek ini diharapkan menjadi pusat pemerintahan baru dan terintegrasi dalam dua hingga tiga tahun mendatang, menggeser kepadatan di pusat kota. “Tahun ini penyusunan DED di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor. Masih rencana (yang dipindahkan) 20 OPD,” kata Rudy.

Ia menjelaskan, Balai Kota Bogor akan tetap berada di Jalan Ir. H. Juanda, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Sedangkan 20 kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan pindah ke pusat pemerintahan baru ialah Sekretariat Daerah, BKPSDM, Badan Kesbangpol, BPBD, Bappeda, Diskominfo, DPMPSTP,

Diarpus, Disdukcapil, dan Disparbud. Kemudian, Diskop UMMK, Disperindag, DP3A, Disdalduk KB, Dinsos, Disnaker, DKPP, Satpol PP Kota Bogor, DLH, dan DPUPR. Ada dua kantor OPD yang masih dipertimbangkan untuk dipindah. “DLH sama DPUPR masih dipertimbangkan, karena ada alat beratnya. Ada truk-truk dan alat berat di kantornya,” jelas Rudy.

Pada pertengahan 2023, Pemkot Bogor telah mengajukan anggaran sekitar Rp200 miliar hingga Rp250 miliar ke Pemerintah Pusat. Namun, belum ada jawaban dari Pemerintah Pusat sehingga Pemkot Bogor harus mencari alternatif lain. “Sekarang baru anggaran perencanaan. Sumbernya kolaborasi dari pemerintah dan swasta,” ucapnya.

Agar menjadi lebih hidup, kawasan sekitar pemerintahan baru Kota Bogor akan dilengkapi dengan fungsi atau fasilitas komersial. Seperti yang pernah disampaikan Wali Kota Bogor, Bima Arya saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bogor Timur.

Menurut Rudy, hal itu akan dikembangkan oleh para developer seperti PT Sejahtera Eka Graha (SEG), Bogor Raya, dan Kemang Regency, sebagai integrasi kawasan secara keseluruhan. Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan proyek pembangunan pusat pemerintahan baru ditargetkan selesai 2028. ● **pra**

### PERSIAPAN TAHUN BARU IMLEK DI CIAMIS

Pengurus klenteng mengganti lampion di Vihara Hok Tek Bio Kab. Ciamis, Jabar, Kamis (1/2). Warga Tionghoa melakukan persiapan untuk menyambut Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili pada 10 Februari 2024.

IDN/ANTARA

